



SIKAP INDONESIA TERKAIT KASUS PENGHINDAR PAJAK: STUDI KASUS INDONESIA-SINGAPURA

Rizka Isti Faricha

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Tax has the highest percentage in the order of income sources of Indonesian state budget. Even though tax revenues in Indonesia can support more than half of the state budget revenue, there are still many tax avoidance which is conducted by Indonesian taxpayers. Within the countries that are listed aimed for the tax amnesty program, Singapore ranked first on the top five positions. This study will explain the internal reasons behind the actions of Indonesia which has chose to implement the tax amnesty policy. Regarding as to why Indonesia chose to implement tax amnesty compared to providing legal sanctions, related to the many cases of tax evasion by Indonesian citizens who hold assets in Singapore. Also to help analyze the above phenomena, the author uses the concept of Foreign Policy Analysis, namely Internal Settings from Richard Synder, Bruck and Sapin. Data was collected using literature review and official government archives. The results showed that internal factors, namely the need for funds to finance government programs, were the driving force for Indonesian government under the leadership of President Joko Widodo to implement the tax amnesty policy and also the dependence of the Indonesian people on Singapore's investment.

Keywords: *tax, tax avoidance, tax amnesty, internal factors, investment*

Pendahuluan

Yurisdiksi rendah pajak merupakan sarana yang sangat menguntungkan untuk memfasilitasi tindakan penghindaran pajak. Membantu pengusaha dan perusahaan untuk terhindar dari tanggungan pajak yang tinggi. Bukan hanya penghindaran pajak, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), koruptor asal Indonesia yang tahu bahwa dirinya terancam dijatuhi hukuman memilih untuk melarikan diri ke Singapura (Margianto 2011). Sebagai contoh adalah kasus Nunun Nurbaeti yang terjerat kasus suap Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 dan Muhammad Nazaruddin yang terjerat kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, memilih negara Singapura agar dapat menghindari proses hukum di Indonesia.

Singapore Ministry of Finance (MOF) menyatakan bahwa rendahnya pajak di Singapura merupakan kekuatan dari Singapura untuk dapat mempertahankan tingkat pajak yang kompetitif. Singapura mampu secara finansial untuk mempertahankan perbedaan tingkat pajak (Singapore Ministry of Finance). Pada tahun 2017 Singapura menaikan tingkat pajak penghasilan perseorangan dengan penghasilan lebih dari S\$ 320.000 (\pm Rp. 310.656.000) pertahun dari 20% menjadi 22%. Sedangkan penghasilan dibawah S\$ 20.000 (\pm Rp. 194.160.000) dibebankan pajak sebesar 0% (Inland Authority Revenue of Singapore 2017). Tetapi meskipun mengalami

kenaikan, tarif pajak Singapura tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Misalnya dapat dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan perseorangan di Indonesia (Supriadi 2015). Tingkat pajak sebesar 30% dibebankan untuk penghasilan lebih dari Rp. 300.000.000 pertahun, sedangkan untuk penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 pertahun pajak yang dibebankan adalah 5% (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2012).

Kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang dikeluarkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan sudut pandang baru bagi penanganan pajak di Indonesia. Pasalnya setelah kebijakan tersebut dikeluarkan, banyak pengusaha asal Indonesia yang ternyata tersangkut masalah perpajakan. Terutama atas kepemilikan aset pribadi maupun usaha di luar negeri. Bagi negara Indonesia, pajak merupakan sumber utama pemasukan APBN. Pada tahun 2017, APBN yang jumlahnya sekitar Rp. 2.080,5 Triliun diperoleh dengan pemasukan pajak sebesar Rp. 1.498,9 Triliun (KEMENKEU RI t.thn.)

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Singapura menyumbang sekitar 42% dari total dana amnesti pajak hingga Agustus 2016 (Florentin 2016). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteady, memaparkan deklarasi lima negara yang paling banyak menyimpan aset negara Indonesia melalui program pengampunan pajak. Ken Dwijugiasteady menyebutkan dalam pemaparannya bahwa Singapura merupakan negara yang menduduki peringkat pertama (Sawitri 2016). Jika ditinjau secara psikologis, pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak tentu sangat tidak memihak wajib pajak yang selama ini patuh dan taat dengan peraturan pajak yang berlaku. Selain mengakibatkan kerugian bagi negara, penghindar pajak juga sudah dengan jelas melanggar peraturan perpajakan. Nukan diberikan sanksi, pemerintah memilih untuk memberikan pengampunan pajak (Ragimun t.thn., p. 9).

Alasan bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan pengampunan pajak terkait kasus penghindaran pajak dianalisis menggunakan konsep *Foreign Policy Analysis* dari Richard C. Snyder, H.W. Bruck dan Burton Sapin, yang mengemukakan bahwa, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan adalah *internal setting*. Dalam indikator internal setting sendiri terdapat *Society* atau masyarakat, dimana *Society* dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara (Snyder, Bruck dan Sapin 1962, p. 201).

Pembahasan

Faktor Internal Pembentuk Sikap Indonesia terhadap Penanganan Kasus Penghindaran Pajak

Tax avoidance atau penghindaran pajak, menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) merupakan sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk menggambarkan susunan urusan wajib pajak yang dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pembayaran dan meskipun dilakukan secara “legal” tetapi biasanya memiliki ketimpangan dengan hukum yang berlaku (OECD t.thn.). Pajak yang seharusnya dibayarkan untuk pembangunan negara dapat dengan mudah disembunyikan, tentu saja hal ini termasuk kedalam sebuah kejahatan.

Globalisasi dapat diartikan sebagai situasi di mana barang dan jasa yang tersedia atau pengaruh sosial dan budaya, secara bertahap menjadi serupa di semua bagian dunia. Globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan teknologi telah membangun era baru dimana waktu maupun batas negara bukanlah hal yang mempersulit proses komunikasi. Kebebasan bagi seseorang untuk mengakses dan memanfaatkan jasa pada bidang perbankan juga disalah gunakan untuk melindungi aset yang dimiliki. Berbagai cara dilakukan oleh perusahaan maupun

perseorangan untuk menghindari akan kewajiban pembayaran atas tagihan pajak yang mereka terima sebagai suatu tarif yang harus dibayarkan setelah pemasukan yang diterima dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga perekonomian di Indonesia. Mulai dari sekedar memalsukan data hingga cara-cara yang tergolong rumit seperti misal mendirikan perusahaan cangkang atau *shell company* diluar negeri untuk melarikan dana mereka yang seharusnya dibayarkan pada negara atas kewajiban pajak.

Penjelasan mengenai keputusan atau sebuah kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara biasanya akan meliputi proses dan hasil dari pengambilan keputusan dengan mengacu pada konsekuensi untuk entitas asing. Biasanya, jangkauan dari kepentingan suatu negara dikerucutkan menjadi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang terhadap sumber daya, atau otoritas yang sah dari negara. Dalam hal ini, pemerintah suatu negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang dirasa akan selaras dengan kepentingan negara. Salah satu titik terpenting yang seringkali dibahas adalah tidak hanya membahas mengenai suatu kebijakan, tetapi juga proses pengambilan keputusan yang merupakan fokus penyelidikan, termasuk pemahaman mengenai suatu masalah, persepsi, penentuan prioritas tujuan, penilaian opsi, dan sebagainya (Hudson 2005, p. 1).

Sikap atau tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak penghindaran pajak adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Setiap tambahan penerimaan merupakan sumber penggerak perekonomian yang diperlukan bagi negara Indonesia. Pada jangka yang lebih panjang, perluasan basis data Wajib Pajak (WP) diharapkan bisa mendukung terwujudnya postur APBN yang lebih sustainable. Penerimaan pajak yang lebih tinggi bisa meningkatkan kapasitas belanja pemerintah, bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur, melainkan juga menjalankan program-program kesejahteraan masyarakat lainnya (KEMENKEU RI 2016).

Tax amnesty dapat dimaknai sebagai ajakan pemerintah kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Selama ini, masih terdapat dana dan aset WNI yang disimpan di luar negeri. Kebijakan pengampunan menciptakan kerelaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan memberikan kesempatan repatriasi. Investasi yang masuk dari fasilitas itu dapat mendukung stabilitas makroekonomi. Misalnya mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan menambah cadangan devisa. Pemerintah mengharapkan kebijakan *tax amnesty* dapat menjadi pintu masuk reformasi sistem pajak pada periode mendatang. Bukan hanya administrasi pajak, melainkan juga perbaikan berbagai aturan terkait perpajakan lainnya. (KEMENKEU RI 2016).

Sosialisasi mengenai program pengampunan pajak yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia gencar dilakukan, tidak hanya didalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menunjukkan keuntungan yang dapat dimaksimalkan oleh wajib pajak jika mengikuti program pengampunan pajak. Tidak hanya itu, gencarnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah menandakan bahwa memang pemerintah serius dalam mensukseskan program ini. Sehingga wajib pajak yang memang melakukan penghindaran pajak dapat menaruh kepercayaannya kepada pemerintah Indonesia, dan bersedia untuk mengikuti program pengampunan pajak.

Poin utama dari analisis menggunakan *Foreign Policy Analysis* (FPA) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dan pengambil keputusan kebijakan luar negeri. Dengan demikian, keunggulan dari kerangka FPA dengan menggunakan dua variabel ini adalah penjelasan pembuatan kebijakan luar negeri sebagai multifaktorial, dengan memeriksa variabel dari lebih dari satu tingkat analisis (multilevel).

Variabel penjelas dari semua tingkat analisis, dari yang paling mikro hingga yang paling makro, dapat dipakai bagi analisis sejauh mereka mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Akibatnya, wawasan dari banyak disiplin intelektual, seperti psikologi, sosiologi, perilaku organisasi, antropologi, ekonomi, dan sebagainya, akan berguna bagi analisis kebijakan luar negeri dalam upaya mereka untuk menjelaskan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Hudson 2005, p. 2).

Sesuai dengan analisis yang penulis ambil, sikap negara Indonesia yang memilih untuk memberlakukan pengampunan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang datang dari dalam negara pembuat keputusan (internal). Berdasarkan acuan tersebut, berikut faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan negara Indonesia yang memilih untuk memberlakukan program pengampunan pajak terkait dengan banyaknya WNI yang melakukan penghindaran pajak di Singapura.

Fungsi Pajak Bagi Indonesia

APBN yang sebagian besar merupakan pemasukan dari pajak, dialokasikan ke berbagai sektor yang ditujukan untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pada sektor pembangunan sarana umum seperti sekolah, jembatan, jalan, dan rumah sakit. Fungsi pajak ini dapat disebut sebagai fungsi *budgetair* pajak. Menurut Mardiasmo pada Pertiwi *et al.* (Pertiwi, Azizah and Kurniawan 2014, p. 2), fungsi dari pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*.

Selain fungsi *budgetair*, terdapat juga fungsi pengatur (*regulerend*). Pajak sebagai alat pengatur dapat diartikan bahwa pajak dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Misalnya untuk melindungi produk dalam negeri, pemerintah dapat menerapkan bea masuk bagi produk-produk impor. Fungsi lain dari pajak adalah pajak sebagai alat untuk menjaga stabilitas. Berhubungan dengan fungsi *regulerend*, pajak juga memiliki fungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan. Pajak hanya dikenakan kepada mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Sedangkan pajak digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum bagi semua kalangan, termasuk mereka yang tidak mampu membayar pajak (Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan 2013).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP) memandang bahwa kemajuan perekonomian nasional juga harus didukung oleh pembangunan infrastruktur. Untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar, pajak lagi-lagi menjadi solusi utama. Pendapatan dalam negeri dari pajak dapat dikatakan sebagai penopang baik anggaran belanja negara dan juga pembangunan nasional. Jika pendapatan dari pajak terhambat, maka pembangunan nasional juga akan terhambat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan 2013). Untuk mendorong pembangunan nasional, pada tahun 2017 pemerintah Indonesia mengadakan program *tax amnesty*. Pada tahun 1984 Indonesia pernah melakukan program pengampunan pajak, tapi kala itu tidak berjalan dengan efektif dikarenakan kurangnya respon dari wajib pajak (Ragimun t.thn., p. 8).

Salah satu tujuan dari penghasilan pajak menurut Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan adalah kemajuan dalam industri manufaktur.

Tabel 1.1 Data Kontribusi Pajak pada Pertumbuhan Industri Manufaktur di Indonesia

Tahun	Kontribusi PPn	Kontribusi PPh
2010	46%	34,7%
2011	60,5%	41,9%
2012	74,2%	55%

Sumber: Data BPS 2012 (Astuti and Aryani 2016, p. 376)

Peran Investasi Asing pada Perekonomian Indonesia

Mengingat tingginya pengaruh potensi investasi asing bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negara Indonesia, pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan pembenahan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan investasi. Tidak hanya pembenahan infrastruktur, kestabilan ekonomi dan politik domestik juga memiliki signifikansi bagi terwujudnya sebuah iklim investasi yang lebih baik (Kementerian Keuangan RI 2018, p. 11-13).

Perekonomian di Indonesia hingga kini masih sangat terpengaruh terhadap aliran dana dari luar negeri. Pada bulan Oktober 2017 terjadi kenaikan volatilitas yang kemudian berpengaruh terhadap menyempitnya ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia. Terjadinya kenaikan volatilitas dikarenakan keluarnya dana investasi yang datang dari luar negeri. Tidak hanya berpengaruh terhadap suku bunga Indonesia, keluarnya dana asing, "... terutama dari pasar saham, telah menurunkan cadangan devisa sebesar hampir 3 miliar dollar AS menjadi sekitar 126,5 miliar dollar AS hanya dalam satu bulan" (Kementerian Keuangan RI 2017).

Tidak hanya berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, investasi dan modal yang ditanamkan oleh negara Singapura juga berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran masyarakat Indonesia. Pasalnya salah satu alasan utama penanaman modal oleh negara Singapura terhadap industri padat karya di Indonesia adalah mengenai ketersediaan tenaga kerja. Tentu saja kerjasama bilateral yang mendatangkan keuntungan bagi negara menjadikan alasan kuat pemerintah Indonesia untuk mempertahankan hubungan baik dengan pemerintah negara Singapura. Pada tingkat internasional, pemerintah akan berusaha memaksimalkan kemampuan mereka untuk memenuhi tekanan domestik sekaligus meminimalkan konsekuensi yang merugikan di ranah internasional (Putnam 1988).

Salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu negara adalah dengan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya pengangguran. Tingginya lapangan kerja yang diciptakan dengan masuknya investasi asing di Indonesia menjadi fokus utama bagi pemerintah untuk mempertahankan agar investasi tersebut tetap mengalir.

Menciptakan lingkungan atau sarana yang bersahabat pada segi perpajakan di Indonesia merupakan perhitungan yang penting. Pasalnya sektor pajak merupakan salah satu faktor utama yang pertama kali dilihat oleh calon investor. Sistem perpajakan yang tidak rumit dan ramah merupakan faktor penting untuk menarik investor. Tidak hanya berpengaruh bagi investor, keramahan aparat perpajakan juga dapat menjadi pendorong untuk peningkatan kepatuhan pajak. Pelayanan yang ramah terutama akan membuat masyarakat tidak segan untuk membayarkan kewajiban pajaknya. Karena ketika melihat kembali pada karakter tiap tiap pengusaha atau para pemegang perusahaan, mereka menggolongkan pajak sebagai suatu pengeluaran yang dianggap dapat mempengaruhi pendapatan atau laba mereka.

Jika dibandingkan dengan pembenahan terhadap regulasi pajak atau memperbaiki sarana investasi seperti stabilitas ekonomi makro dan kecukupan infrastruktur publik, penerapan *tax holiday* ataupun *tax amnesty* memang sering dipilih oleh pemerintah suatu negara. Selain melihat dari pendeknya jangka waktu yang diperlukan dengan besarnya penghasilan yang didapatkan, keuntungan pada sektor investasi yang dapat bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional juga dapat menjadi perhitungan.

Society: Kebutuhan Dana Pemasukan Negara dan Investasi Asing

Analisis pertama adalah dari sisi alasan pengambil keputusan atau institusi yang mengatasmakan negara, yaitu pemerintah Indonesia. Resmi menyandang gelar sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla berusaha untuk mendongkrak potensi Indonesia pada segi ekonomi. Dalam sekitar tiga tahun menjabat pada kursi eksekutif, Pemerintah Indonesia dalam pimpinan Presiden Jokowi mengeluarkan kurang lebih sebanyak 16 kebijakan ekonomi (Sukmana 2017).

Alasan bagi pemerintah untuk mengedepankan permasalahan ekonomi tidak lain dikarenakan permasalahan pembangunan infrastruktur, bantuan kesehatan dan pendidikan (Fachrudin 2017). Pembangunan infrastruktur sekaligus pemberian bantuan kesehatan dan pendidikan merupakan kegiatan yang memerlukan banyak dana. Sehingga rancangan untuk mewujudkan tiga hal ini juga harus diiringi dengan besarnya pendapatan negara yang harus digunakan. Presiden Joko Widodo berusaha untuk menuntaskan tiga permasalahan tersebut dengan cara meningkatkan pemasukan negara. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menjabat hingga tahun 2016 memberikan penjelasan mengenai upaya untuk menaikan penerimaan negara dalam rangka mendorong dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

Dalam menghadapi persaingan global, pemerintah Indonesia memfokuskan terhadap pembangunan infrastruktur. Negara diperkirakan memerlukan dana sekitar Rp4.900 triliun. Sedangkan kemampuan APBN hanya sanggup menganggarkan sebesar Rp1.500 triliun (Kantor Staf Presiden 2016). Program pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo mengedepankan peningkatan pembangunan infrastruktur, yang juga harus diikuti dengan peningkatan pendapatan negara untuk membiayai program-program yang dicanangkan. Dalam rangka menaikan pendapatan dalam sektor pajak, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menarik pendapatan pajak yang dapat dikatakan tersembunyi di luar negeri dengan menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Menerapkan sistem sukarela dari wajib pajak untuk mendeklarasikan kekayaan yang sesungguhnya jika ingin mengikuti program pengampunan pajak. Kemudian memberikan wacana berupa sanksi lebih tegas yang akan diterapkan jikalau sesudah periode pengampunan pajak berakhir masih terdapat wajib pajak yang belum mendeklarasikan jumlah kekayaannya secara jujur. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kebersediaan wajib pajak secara sukarela ikut dalam penyuksesan program pengampunan pajak.

Pengamanan penerimaan pajak memang perlu dilakukan, mengingat pajak merupakan sumber utama pemasukan negara Indonesia. Keselarasan dengan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia juga dijadikan pondasi kuat bagi pengimplementasian kebijakan ini.

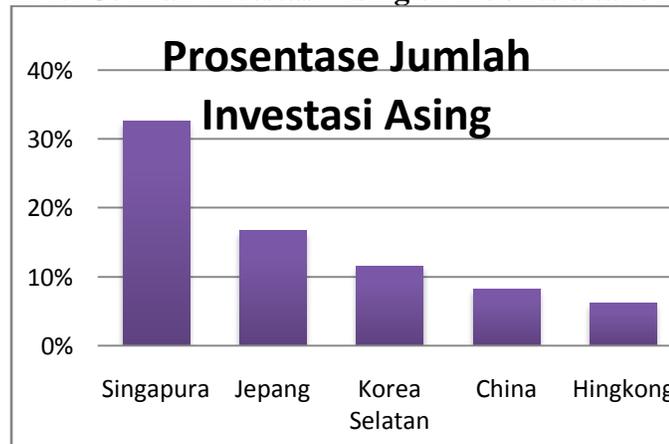
Pemerintah optimis realisasi belanja APBN-P 2017 dapat dioptimalkan. Realisasi belanja sampai dengan 30 November 2017 tercatat Rp1.749,54 triliun atau 83% dari outlook APBN-P 2017. Penyerapan belanja ini tumbuh 8,6% atau lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada tahun 2016 sebesar 5,8%. Belanja tersebut sebagian diantaranya diwujudkan dalam pembangunan dan program prioritas pemerintah. Selanjutnya, pembiayaan investasi sampai dengan November 2017 tercatat sebesar Rp6 triliun dari Rp59,73 triliun yang dialokasikan pada APBN-P 2017(Kementerian Keuangan RI 2017).

Selain mengenai besarnya kebutuhan dana yang digunakan untuk membiayai program peningkatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia, pengaruh investasi oleh negara Singapura juga dapat dijadikan sebagai alasan mengapa Indonesia sangat berhati-hati dalam menentukan langkah untuk menangani perihal banyaknya aset WNI yang disimpan disana melalui tindak penghindaran pajak.

Tidak hanya berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan perekonomian negara Indonesia, investasi dan modal yang ditanamkan oleh negara Singapura juga berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran masyarakat Indonesia. Pasalnya salah satu alasan utama penanaman modal oleh negara Singapura terhadap industri padat karya di Indonesia adalah mengenai ketersediaan tenaga kerja.

Dari beberapa negara yang menanamkan investasinya di Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Media Keuangan edisi Desember 2017 menyebutkan bahwa; “Kontributor terbesar dari investasi asing ke Indonesia adalah Singapura (30persen), Jepang (13,3 persen), Tiongkok (9,6 persen), dan Amerika Serikat (7 persen).” (Kementerian Keuangan RI 2017)

Grafik 1.1 Jumlah Investasi Asing di Indonesia tahun 2018



Hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan negara Singapura dalam berbagai bidang terjalin dengan baik. Salah satu faktor pendukung yang paling terlihat dari terjalinnya hubungan ini dengan baik adalah dikarenakan oleh faktor geografis. Beberapa sektor yang diminati oleh negara Singapura untuk menanamkan modalnya di Indonesia antara lain adalah “... antara lain industri kertas dan percetakan, kimia dan farmasi, makanan, elektronika, permesinan dan logam.” (Kementrian Perindustrian 2016). Negara Singapura juga merupakan salah satu

negara yang menanamkan investasi besar di Indonesia. “...banyak pula investor asal India maupun Eropa yang berinvestasi ke Indonesia melalui Singapura” (Setiawan 2018)

Kesimpulan

Dalam mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, Pemerintah Indonesia mendapatkan pengaruh dari beberapa faktor. Dari faktor internal atau *internal setting* yang disebutkan dalam hipotesis, dalam mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Pemasukan dari program pengampunan pajak maupun dari investasi yang dihasilkan dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai segala program rancangan pemerintah. Baik perbaikan infrastruktur maupun peningkatann kesejahteraan ekonomi keduanya membutuhkan sokongan dana yang tinggi. Pemanfaatan penarikan dana yang ada di luar negeri dirasa oleh penulis merupakan strategi yang baik. Pasalnya selain singkatnya periode pelaksanaan program, tetapi hasil yang didapatkan merupakan sebuah keuntungan bagi pemerintah Indonesia terlepas dari pro dan kontra mengenai pencapaian target. Tidak memilih menggunakan protes, pemerintah Indonesia menggunakan strategi kebijakan negara yang memiliki pondasi hukum kuat dan diharapkan akan menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Singapura. Konflik dalam hal ini tidak diharapkan terjadi oleh pemerintah Indonesia.

Selain kebutuhan dana yang banyak oleh pemerintah Indonesia, investasi asing dari negara Singapura juga memiliki peran yang penting dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Dorongan pada bidang industri dan banyaknya lapangan kerja yang dihasilkan oleh penanaman modal asing oleh negara Singapura merupakan keuntungan besar bagi negara Indonesia. Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing, terutama dari negara Indonesia tidak menyediakan pilihan selain membangun hubungan baik dengan pemerintah Singapura.

Referensi

- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2013. WP Patuh Bayar Pajak, Pembangunan Infrastruktur Bisa Lancar. <<https://www.kemenkeu.go.id/Berita/wp-patuh-bayar-pajak-pembangunan-infrastruktur-bisa-lancar>> (diakses pada 23 Oktober 2017)
- . 2013. Mari Pahami Fungsi Pajak.< <http://www.pajak.go.id/content/mari-pahami-fungsi-pajak>> (diakses Oktober 23, 2017).
- Fachrudin, Fachri. 2017. Tiga Tahun Jokowi, Masyarakat Puas tapi Keluhkan Kondisi Ekonomi. <<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/08/17065221/tiga-tahun-jokowi-masyarakat-puas-tapi-keluhkan-kondisi-ekonomi>> (diakses September 25, 2018).
- Florentin, Vindry. 2016. Tax Amnesty, 7 Negara Ini Tempat WNI Simpan Hartanya. <<https://bisnis.tempo.co/read/797993/tax-amnesty-7-negara-ini-tempat-wni-simpan-hartanya/full&view=ok>> diakses pada 20 Desember 2018
- Hudson, Valerie M. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations .” Dalam *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*, 1. Blackwell Publishing, 2005.
- Kantor Staf Presiden. 2016. Amnesti Pajak Berlaku untuk Semua.<<http://ksp.go.id/amnesti-pajak-berlaku-untuk-semua/>> diakses pada 20 Desember 2018
- KEMENKEU RI. “MEDIAKEUANGAN .” *VOLUME XI / NO. 103 / APRIL 2016*, April 2016.
- . “MEDIAKEUANGAN .” *VOLUME XII / NO. 123 / DESEMBER 2017*, Desember 2017.
- . “APBN KITA: Kinerja dan Fakta.” 2018.

- Kementrian Perindustrian. 2016. Singapura Minat Investasi Sektor Industri di Indonesia <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/17467/Singapura-Minat-Investasi-Sektor-Industri-di-Indonesia>> (diakses September 26, 2018).
- OECD. Glossary of Tax Terms. <<http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm>> (diakses November 6, 2016).
- Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan. 2014. "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)." *Jurnal Perpajakan /Vol. 3 No. 1*
- Ragimun. "ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA."Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI.
- Schreuer, Christoph. 2008. *Investment Protection and International Relations*. Oxford University Press. Page 345-358
- Snyder, Richard C., H.W. Bruck, dan Burton Sapin. *Foreign Policy Decision Making*. Palgrave Macmillan, 1962.
- Sukmana, Yoga. KOMPAS. 2017. Reputasi Ekonomi RI di Bawah Nakhoda Jokowi Diakui Dunia? <<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/31/124158126/reputasi-ekonomi-ri-di-bawah-nakhoda-jokowi-diakui-dunia>> (diakses September 25, 2018).